

**PERAN APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT**

(Skripsi)

Oleh

**RISKA IKA YULIA
NPM 1916021037**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

Oleh

RISKA IKA YULIA

Peran Aparatur merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan gotong royong pembangunan suatu wilayah, selain untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong juga untuk menyelaraskan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya peran Aparatur Pemerintahan khususnya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung serta partisipasi aktif dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan BBRGM. Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kegiatan BBRGM, dilihat dari aspek pemerintah sebagai Regulator dalam program tersebut, sudah berperan dalam menyediakan dan menetapkan peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemerintah sebagai dinamisator, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan program pemerintah kegiatan BBGRM di Kota Bandar Lampung masih belum berjalan dengan baik. Pemerintah sebagai Fasilitator, Dinas Pemberdayaan Masyarakat memberikan layanan serta fasilitas yang baik khususnya dalam pelaksanaan program kegiatan BBGRM, akan tetapi pemerintah menjadi fasilitator belum berperan dalam membangun kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

ABSTRACT

THE ROLE OF THE BANDAR LAMPUNG CITY COMMUNITY EMPOWERMENT OFFICE APPARATUS IN INCREASING COMMUNITY COOPERATION MONTH ACTIVITIES

By

RISKA IKA YULIA

The role of apparatus is one of the important indicators in mutual cooperation activities in the development of a region, in addition to preserving the values of mutual cooperation, it is also to align the goals to be achieved by the government and the community. Community Mutual Devotion Month (BBGRM) activities in its implementation require the role of Government Apparatuses, especially the Public Empowerment Service Officers of Bandar Lampung City and active participation from the people of Bandar Lampung City. This study aims to determine the role of the City of Bandar Lampung Community Empowerment Service Apparatus in improving BBRGM activities. The type of research used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the role of the Community Empowerment Service in improving BBRGM activities, seen from the aspect of the government as a Regulator in the program, has played a role in providing and establishing regulations that are used as the basis for implementing these activities. The government as a dynamicator, the Community Empowerment Service in improving government programs for BBRGM activities in Bandar Lampung City is still not going well. The government as a facilitator, the Community Empowerment Service provides good services and facilities, especially in the implementation of the BBRGM activity program, but the government as a facilitator has not played a role in building conducive conditions for the implementation of these activities.

**Keywords: The Role of Government, Community Mutual Cooperation
Bhakti Month**

**PERAN APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT**

Oleh

RISKA IKA YULIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERAN APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT**

Nama Mahasiswa : **Riska Ika Yulia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021037**

Program studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Denden Kurhia Drajat, M.Si.
NIP. 196007291990101001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**

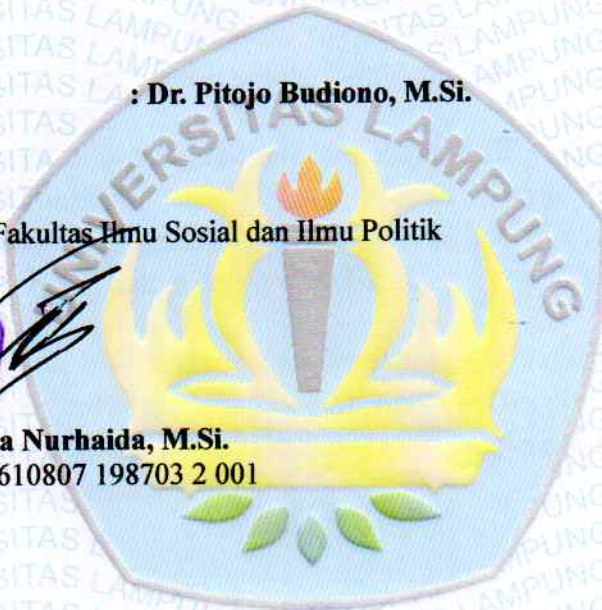


Penguji : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Riska Ika Yulia
NPM. 1916021037

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 04 Juli 2001, merupakan putri pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Mudiono dan Ibu Purwa Ningsih.

Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri Sri Menanti Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Air Hitam yang selesai pada Tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Way Tenong yang selesai pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur PMPAP dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis mengikuti organisasi kampus Laskar Muda FSPI dan yang tergabung pada divisi Hubungan Masyarakat pada Tahun 2019 – 2020.

Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari Tahun 2022 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Pekon Suka Jaya Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2022 Penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan”

(Sophocles)

“With education you’re given tools to help other people”

(Maudy Ayunda)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you.”

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya*. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya.”

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada:

“Alm. Ayah, Ibu dan Adikku Tercinta”

Terima kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkan di perantauan, memberi semangat disegala keterbatasan dan mendukung setiap langkahku.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staf dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang membangun guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis, semoga segala kebaikan yang bapak lakukan bernilai pahala dari Allah SWT.
4. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Dosen Penguji Utama skripsi penulis. Terima kasih atas semua saran dan masukan yang bapak berikan dalam proses perbaikan skripsi yang mengarahkan penulis agar

menghasilkan skripsi yang lebih baik, serta terima kasih atas ilmu, nasehat dan pengertiannya, semoga bapak sehat selalu dan kebaikan yang bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.

5. Bapak Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang bapak berikan selama menjalani proses perkuliahan yang menuntun penulis agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayah Alm. Mudiono dan Ibu Purwa Ningsih. Terima kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang selalu menguatkan di perantauan, memberi semangat disegala keterbatasan dan selalu mendukung setiap langkahku.
8. Adikku tersayang Risky Dwi Permadi, satu-satunya saudara yang membuat saya mampu bertahan sampai pada titik ini. Terima kasih sudah menjadi salah satu alasan saya untuk tetap semangat.
9. Teruntuk nenek dan kakekku, Suroto dan Saniah. Dua orang yang sudah merawat saya sedari saya kecil. Terima kasih telah mendoakan, menyemangati dan mengantarkan saya berada di tempat ini.
10. Kepada seluruh informan yang telah membantu dalam proses penelitian terutama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Bapak Drs. Jainuddin, M.IP. dan Kepala Bidang dua Bapak Faisal Risa, S.Ag., S.H., M.H., yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
11. Teruntuk Ikkal, terima kasih atas segala bentuk dukungan, semangat, dan juga perhatian yang telah diberikan kepada penulis, serta terima kasih telah bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah mengenai segala hal yang dihadapi oleh penulis selama proses penulisan skripsi ini.

12. Sahabat terbaikku Yolanda Putri yang telah kebersamai saya dalam pengerjaan skripsi dan selalu saya repotkan, terima kasih telah menjadi keluarga kedua di perantauan, telah menjadi tempat ternyaman untuk berkeluh kesah, terima kasih atas segala bantuan serta canda dan tawa yang senantiasa diciptakan untuk tetap tersenyum, terima kasih telah bersedia menyediakan bahu untuk beristirahat. Terima kasih untuk semua hal yang telah kita lalui bersama selama ini. Teruntuk sahabatku Sucia Wati, terima kasih telah kebersamai saya selama penulisan skripsi ini, terima kasih untuk hal-hal yang sudah kita lalui bersama, terima kasih untuk bantuan, dukungan serta canda tawa selama ini. Semoga setelah ini akan tetap ada cerita bersama yang tertulis, mimpi yang tercapai dan sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.
13. Teruntuk Putri Augustine dan Alyfia Syavira, terima kasih telah menjadi motivator, tempat bercanda dan bercerita, menjadi tempat untuk berkeluh kesah dengan pahitnya kehidupan, dan terima kasih atas semangat, dukungan serta doa yang kalian berikan. Dari kalian saya menemukan banyak pelajaran hidup yang belum saya lalui sekarang, Terima kasih untuk hal-hal berharga yang sudah kita lalui bersama kemarin.
14. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 19, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi sehingga secara tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
15. Teruntuk teman satu daerahku Dhepi Martylofa, Lulu Anggun Sartika, dan Muhammad Abrori Achwan terima kasih atas segala kebaikan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada saya. Terima kasih atas semua bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan dengan bernilai pahala.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan semangat yang telah peneliti terima dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Riska Ika Yulia

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Teori Peran (<i>Role Theory</i>)	11
2.1.1. Indikator Peran	14
2.1.2. Konsep Peran	16
2.1.3. Jenis Peran.....	17
2.2. Tinjauan Peran Pemerintah	18
2.3. Tinjauan Pemberdayaan.....	23
2.3.1. Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	27
2.3.2. Program Pokok Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	29
2.4. Tinjauan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).....	30
2.4.1. Pengorganisasian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	31
2.4.2. Bidang-Bidang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	34
2.5. Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Tipe Penelitian	38
3.2. Lokasi Penelitian.....	39
3.3. Fokus Penelitian.....	40
3.4. Sumber Data	41
3.5. Informan Penelitian.....	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	43

3.7. Teknik Pengolahan Data	48
3.8. Teknik Analisis Data	49
3.9. Teknik Validasi Data	51
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	53
4.1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat	53
4.1.1 Riwayat Nama-Nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	53
4.1.2 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	54
4.1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	54
4.1.4 Tujuan Dan Sasaran Tugas Fungsi Pokok.....	55
4.1.5 Susunan Organisasi, Nama Dan Struktur Jabatan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	56
4.1.6 Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	59
4.2. Gambaran Umum Kelurahan Kampung Baru	60
4.2.1. Letak Geografis	60
4.2.2. Struktur Organisasi.....	61
4.3. Gambaran Umum Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	62
4.3.1. Dasar Hukum	62
4.3.2. Maksud dan Tujuan.....	62
4.3.3. Sub-kegiatan yang Dilaksanakan	63
4.3.4. Indikator dan Keluaran	63
4.3.5. Cara Pelaksanaan Sub-kegiatan	64
4.3.6. Lokasi Pelaksanaan	64
4.3.7. Jadwal Pelaksanaan Sub-kegiatan.....	64
4.4. Laporan Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	65
4.4.2. Maksud dan Tujuan.....	66
4.4.3. Hasil yang Diharapkan.....	66
4.4.4. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Pembinaan.....	66
4.4.5. Pemateri/Narasumber dan Ringkasan Materi.....	67
4.4.6. Diskusi	70
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	72
5.1. Hasil Penelitian Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	72
5.1.1. Pemerintah Sebagai Regulator	73
5.1.2. Pemerintah Sebagai Dinamisator	78
5.1.3. Pemerintah Sebagai Fasilitator.....	84
5.3 Pembahasan Hasil Penelitian Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota	

Bandar Lampung.....	91
5.3.1 Pemerintah Sebagai Regulator	93
5.3.2 Pemerintah Sebagai Dinamisator	95
5.3.3 Pemerintah Sebagai Fasilitator.....	97
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	101
6.1 Simpulan	101
6.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Kecamatan yang Mengikuti Kegiatan BBGRM	5
2. Informan Penelitian	38
3. Kegiatan Observasi	40
4. Kegiatan Wawancara	43
5. Riwayat Nama-Nama Kepala Dinas PMK.....	49
6. Jumlah Pegawai Dinas PMK	50
7. Nama dan Struktur Jabatan Pegawai Dinas PMK.....	52
8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	55
9. Batas Wilayah Kelurahan Kampung Baru	57
10. Matriks Pelaksanaan Kegiatan	61
11. Ringkasan Materi Narasumber.....	63
12. Triangulasi Data Penelitian	86
13. <i>Role Theory</i>	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	33
2. Struktur Organisasi Kampung Baru	57
3. Aparatur Dinas PMK yang Ikut Berpartisipasi dalam Pembinaan BBGRM	76
4. Pelaksanaan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.....	77
5. Pelaksanaan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.....	81
6. Kondisi Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.....	82

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara Indonesia, membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan dalam berperilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu praksis Pancasila dalam relasi sosial kehidupan bermasyarakat adalah nilai gotong royong. Gotong royong menjadi salah satu sistem nilai budaya khas Indonesia yang perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat kedudukan seseorang tetapi lebih melihat pada kebersamaan masyarakat untuk saling membantu dalam suatu kegiatan.

Gotong royong adalah salah satu aktivitas sosial yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Kegiatan gotong royong secara sederhana mempunyai arti kerja sama secara suka rela antar individu dan antar kelompok yang membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Aktivitas kerjasama yang demikian merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial (Nasution, 2009).

Nilai gotong royong termasuk dalam budaya daerah yang harus tetap dilestarikan agar budaya bangsa Indonesia tidak hilang terenggut zaman. Pada era ini, perubahan sosial telah menyebabkan nilai-nilai lama yang selama ini menjadi pegangan dan acuan dalam relasi sosial berbasis pada semangat dan nilai-nilai gotong royong mulai menurun. Masuknya pengaruh budaya luar yang sangat individual saat ini, rasa kebersamaan dan gotong royong semakin

memudar, kepekaan sosial mulai berkurang, tegur sapa dan bercengkrama serta kesadaran saling membantu sudah mulai luntur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksanaan otonom daerah yang melaksanakan unsur pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, dibawah tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat memiliki Program Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dengan Sub-kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan sasarannya yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan meningkatkan kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintahan kelurahan serta dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan kelurahan serta dalam rangka memberdayakan msyarakat, meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab terhadap hasil-hasil dalam pembangunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung diamanahkan untuk dapat membina seluruh kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung sebanyak 126 Kelurahan dengan Kecamatan sebanyak 20 Kecamatan.

Dari banyaknya Kelurahan yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dapat mempengaruhi perannya sebagai pendamping masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh aparatur Dinas

Pemberdayaan Masyarakat ini adalah kurangnya semangat dan kekompakan pengurus Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan sulitnya mengkoordinir warga masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong tersebut. Pada permasalahan dalam sulitnya mengkoordinir masyarakat untuk mengikuti kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat memerlukan peran dari Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai elemen yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin. Dengan itu Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung harus memberikan perannya semaksimal mungkin agar kegiatan tersebut berjalan dengan maksimal dan dapat diterapkan di setiap kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Di Kota Bandar Lampung masih terdapat masyarakat yang kurang aktif atau bahkan tidak mengikuti kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh arus modernisasi dan globalisasi, pekerjaan dan kesibukan lainnya sehingga kurangnya waktu luang untuk turut serta dalam kegiatan gotong royong. Beberapa masyarakat Kota Bandar Lampung hanya mengerjakan kegiatan tersebut apabila ada himbuan dari aparat setempat dan pihak kelurahan. Kurangnya sanksi yang tegas ataupun teguran pada masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tersebut membuat masyarakat menjadi acuh dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Kegiatan bersama yang masih terlihat hanya pada saat pelaksanaan kebijakan Selasa dan Jumat Bersih, yang mengikuti kegiatan tersebut hanya aparat dan beberapa masyarakat tidak semua masyarakat ikut andil dalam kegiatannya.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu upaya untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong pada masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan. Kegiatan ini mengikutsertakan seluruh

komponen bangsa termasuk unsur departemen, lembaga pemerintah non departemen.

Secara prinsip, gotong royong merupakan wujud kebersamaan suatu masyarakat, sedangkan kebersamaan adalah salah satu hakekat kemanusiaan. Manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk sosial yang mempunyai kesamaan. Tanpa adanya kesamaan manusia tidak akan bisa hidup bersama. Tekad Pemerintah menyatukan kembali kebersamaan masyarakat dalam bentuk Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan warisan bangsa.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadikan Hari Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagai hari yang mempunyai arti mendalam. Hal tersebut didasari karena budaya gotong royong saat ini semakin luntur dalam tata kehidupan masyarakat perkotaan. Pemerintah daerah berharap bahwa adanya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat akan mampu meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan menuju pada penguatan integrasi sosial, pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, melibatkan perempuan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan akan menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab masyarakat.

Tabel 1. Daftar Kecamatan yang mengikuti kegiatan BBGRM

No	KECAMATAN
1	Kedaton
2	Labuhan Ratu
3	Sukarame
4	Way Halim
5	Kemiling
6	Langkapura
7	Tanjung Karang Timur
8	Kedamaian
9	Tanjung Karang Pusat
10	Enggal
11	Teluk Betung Barat
12	Teluk Betung Timur
13	Teluk Betung Selatan
14	Bumi Waras
15	Raja Basa
16	Tanjung Senang
17	Sukabumi
18	Tanjung Karang Barat
19	Teluk Betung Utara
20	Panjang

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2022)

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup pemerintahan, peran pemerintah dalam membangun masyarakat saat ini sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah sebagai pelaku utama pembangunan, dimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi. Namun terkadang tujuan

pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tidak seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sangat penting, agar selaras antara tujuan yang ingin dicapai pemerintah dan tujuan yang diinginkan masyarakat. Terdapat tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat menurut Conyers (1992), *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Kemudian, untuk memperkuat penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu yang sejenis sebagai pembanding. Penelitian yang mengkaji tentang Peran atau Partisipasi. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain:

1. Drs. Almasri, M.Si. Devi Deswimar, S.Sos, M.Si. 2004. Dengan judul penelitian "Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat program-program nasional yang salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemiskinan dan keterletarbelakangan padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang

paling strategis dalam era ekonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat. Artinya program pemberdayaan masyarakat desa adalah program yang sangat mementingkan kebutuhan masyarakat pedesaan.

2. Bayu Aprianto. 2019. Dengan judul penelitian “Peran Kepemimpinan Kepala Dinas dalam Pembentukan Budaya Kerja di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin bertugas memantau arus informasi yang terjadi dari mana dan apa saja yang masuk ke dalam organisasi. Informasi yang diperoleh seorang pemimpin selain berguna dalam fungsi kepemimpinannya juga harus disalurkan kepada pihak lain dalam organisasi tersebut. Informasi yang disalurkan haruslah tepat, dan akurat. Pemimpin juga seharusnya sering memonitor terutama apabila anak buahnya tidak bisa menyampaikan informasi dengan baik, apa lagi informasi tersebut disampaikan kepada berbagai pihak di luar organisasi, terutama yang menyangkut informasi tentang rencana kerja, kebijaksanaan, tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh organisasi. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Di lain hal, pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang

ditimbulkannya. Melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.

3. Eva Nur Hidayah. 2020. Dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan sudah baik. Terdapat beberapa alur yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Alur tersebut yaitu 1) diawali dengan adanya pengorganisasian tim pelaksana yang dipegang oleh LPMK; 2) persiapan yang diwujudkan dengan adanya Musrenbangkel; 3) pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh masing-masing tingkatan kegiatan, baik itu kegiatan pada tingkatan RT, RW, maupun tingkat Kelurahan; 4) pembinaan pengendalian pelaksanaan kegiatan dari pemerintah kelurahan yaitu dibina langsung oleh Lurah dan LPMK pada saat Rakor (Rapat Koordinasi); 5) terdapat monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilakukan tidak secara khusus.
4. Edi Setiawan, Edhi Siswanto. 2019. Dengan judul penelitian “Implementasi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Gerakan Gotong Royong (Studi kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan pembangunan desa maupun program pemberdayaan masyarakat yang ada, dilaksanakan dengan telah melibatkan peran serta dari masyarakat desa yang berada di tepi pantai tersebut. Program-program kegiatan pemeliharaan fasilitas umum dan jalan desa, keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, dan gerakan sadar hidup sehat, sudah mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah desa. Semua kegiatan di desa tersebut senantiasa melibatkan peran serta masyarakat. Untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial seperti arisan di masing-masing RT dan RW juga mendapatkan dukungan penuh dari pihak

pemerintah desa. Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa selalu hadir dan mengikuti semua kegiatan tersebut. Antusiasme dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Dimana jarang sekali kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial ini dilakukan oleh inisiatif orang perseorangan, melainkan selalu muncul atas prakarsa dari sekelompok masyarakat.

5. Lasiman Sugiri. 2015. Dengan judul penelitian “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dan stafnya dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemberdayaan masyarakat, antara lain: mengidentifikasi faktor pendukung dan proses pemberdayaan masyarakat penghambat. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan terfokus pada berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai masyarakat bangsa, yaitu pemberdayaan dalam pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik. Pemberdayaan masyarakat mutlak harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan stafnya harus berdiri adalah kekuatan besar anggotanya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup. Peran pemerintah daerah (gubernur atau bupati, atau walikota, dan area stafnya) dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan publik, atau persiapan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri dalam menentukan masa depan, serta mampu berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat-masyarakat itu sendiri di daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu apakah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sudah melakukan perannya sebagai regulator, dinamisator dan

fasilitator dalam meningkatkan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat disusun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak.

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmiah dalam Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang peran pemerintahan dalam bahasa birokrasi pemerintahan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2013).

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran.

Menurut Linton (1936, dalam Cahyono, 2008), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut: 1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; 2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 3. kedudukan orang-orang dalam berperilaku; 4. kaitan antar orang dan perilaku.

Dalam hubungan dengan perilaku seseorang melalui pergaulan hidupnya, manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang pada prinsipnya menuntut peran yang dilakoninya baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian perilaku seseorang akan mempengaruhi perannya dalam kelompok, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa kelompok juga memiliki peran terhadap individu sehingga di antara keduanya selalu saja saling ketergantungan sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungan. Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Sehingga peran mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Soekanto, peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 1987)

Dalam peran ada 3 hal yang mencangkup didalamnya:

- a. Meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Ciri-ciri peran, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian dalam aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur masyarakat.

Hal-hal penting yang terkait dengan peranan:

- a. Bahwa peranan-peranan harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seharusnya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

Kutipan (Soekanto, 1987), lebih lanjut Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan, peran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

2.1.1 Indikator Peran

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan. Ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolok ukur dalam suatu peranan. Indikator ataupun ukuran peranan sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Adapun survei literatur mengenai indikator yang menjadi ukuran peranan adalah sebagai berikut.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Thoha (2012), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya

diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

- c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
 - a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasikan seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :
 - 1) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi,yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
 - 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
 - 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.

- 5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
 - a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.

2.1.2 Konsep Peran

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa peran peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran menurut Soekanto (2012) adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Peran

Persepsi peran adalah pandangan terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan dari interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya berperilaku.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini oleh orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Konflik peran dapat terjadi apabila seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, hal tersebut dapat mengakibatkan konflik peran. Konflik peran akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi dibandingkan dengan peran lain.

2.1.3 Jenis Peran

Menurut Soekanto (2012), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat-saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2 Tinjauan Peran Pemerintah

Untuk menjalankan tugas negara sehari-hari, maka dibentuklah pemerintah. Pemerintah sebagai personifikasi negara berupaya sedapat mungkin untuk mewujudkan tugas dan tujuan negara menjadi kenyataan dan sebagai personifikasi atau alat pemerintah adalah birokrasi pemerintah sebagai pelaksana jabatan karier.

Birokrasi pemerintah di tingkat pusat disebut kementerian Negara beserta jajarannya yang membantu fungsi kekuasaan eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang mewujudkan fungsi eksekutif sehari-hari adalah birokrasi pemerintah, sehingga peranan birokrasi menjadi penting.

Pemerintahan pada akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok. Orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari urusan kekuasaan. Pemerintah tentunya memiliki peranan penting sebagai seorang yang memegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator), serta fasilitator dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pada konteks pendampingan masyarakat ada beberapa peran menurut Zubaedi (2013) yang menjadi tanggung jawab para pelayan masyarakat, yaitu:

- a. Sebagai motivator. Pada peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam serta sekaligus mengembangkan kesadaran

anggota masyarakat mengenai hambatan ataupun permasalahan yang dihadapi.

- b. Sebagai komunikator. Pada peran ini, pendamping harus bisa menerima serta memberi informasi dari berbagai sumber pada masyarakat, agar dapat dijadikan rumusan dalam pengurusan dan pelaksanaan beraneka program dan opsi pemecahan masalahnya.
- c. Sebagai fasilitator. Pada peran ini pendamping berusaha memberikan arahan mengenai penggunaan beraneka teknik, strategi, serta pendekatan pada pelaksanaan program.

Adanya peran aparatur pemerintah yang optimal dan mendalam agar dapat membangun masyarakat, maka dari itu peran aparatur pemerintah yang dimaksud oleh Yusuf (2014) yaitu:

- a. Pemerintah sebagai regulator

Pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya di pahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme.

Peran regulator kemudian dikembangkan dengan merujuk pada aspek aturan atau mekanisme. Hal ini dimaksudkan bahwa terkait dengan aturan atau mekanisme haruslah diciptakan oleh pemerintah agar menjadi sebuah patokan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa

kebijakan ataupun aturan lainnya di ciptakan dengan tujuan peningkatan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara umum dan menyeluruh.

b. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu membangkitkan partisipasi masyarakat apabila terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan menggunakan pemberian bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan menggunakan tim penyuluhan ataupun badan tertentu agar diberikan pelatihan. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat di butuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memeberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Selanjutnya pembahasan terkait dengan dinamisator diuraikan dalam aspek pemberian bimbingan melalui pembinaan program kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang setiap tahunnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi

agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Kemudian dengan melihat peran dari fasilitator itu sendiri tentunya memiliki tanggung jawab hingga kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutuhan untuk keberlangsungan suatu kegiatan. Dengan tersedianya tempat dengan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan memberikan sarana yang diharapkan oleh masyarakat tentu akan mendorong partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkannya sehingga peran dari fasilitator dalam kegiatan ini dapat lebih optimal.

Pemerintah tentunya memiliki peranan penting sebagai seorang yang memegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator), serta fasilitator dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu perilaku yang sangat diharapkan oleh beberapa orang kepada seseorang yang memiliki peran ataupun wewenang tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa apabila dikaitkan dengan pemuda dan olahraga, peran bukan berarti sebagai hak dan kewajiban seorang diri, melainkan tugas dan wewenang dinas tersebut.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian, (Blakely, 1989) dalam Kuncoro (2004) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator.

- a. Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan

bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

- b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu. Serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memelihara lingkungan hidup dan diarahkan untuk mendukung upaya pertahanan keamanan.

2.3 Tinjauan Pemberdayaan

Menurut Totok dan Poerwoko (2012) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai, upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.

World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012) mengartikan pemberdayaan yaitu, upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2012) menyatakan bahwa, prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok dan Poerwoko (2012) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Menurut Mardikanto dalam (Anggraini dan Djumiarti) Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk

memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku di semua *stakeholder* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif, yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Menurut Sumaryadi dalam (Anggraini dan Djumiarti) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan sosial berkelanjutan.

Prinsip pemberdayaan menurut Cahyono (2008) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal
- b. Lebih mengutamakan aksi sosial
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja
- e. Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan

Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya.

Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan & Hempri S (2003) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- b. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.
- d. Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Sedangkan Menurut Sulistyani (2004), bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut Sulistyani (2004), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tahapan-tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto dalam (Wrihatnolo, 2007) sebagai berikut :

1. Tahap Penyadaran, memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar keluar dari keterpurukan, biasanya tahap ini dilakukan dengan pendampingan. Pada tahap ini pihak yang memberdayakan memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk memahami potensi yang dimiliki.
2. Tahap Pengkapasitasan, memampukan masyarakat agar memiliki keterampilan untuk mengambil peluang yang diberikan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang memiliki tujuan lifeskill. Pengkapasitasan meliputi peningkatan kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai.
3. Tahap Pendayagunaan, tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan sebelumnya. Pada tahap ini akan diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera.

Adapun disini membahas mengenai peraturan yang mengatur tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017. Dimana pada Peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik. Pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan

berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Untuk mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

2.3.1 Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada pasal 3 s/d pasal 6. Pada pasal 3 terdiri dari tiga ayat yaitu, 1) Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK secara nasional. 2) Gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sesuai dengan kewenangannya. 3) Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya yaitu pasal 4 yaitu, Dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara nasional, Menteri bertanggungjawab kepada Presiden. Lebih lanjut pasal 5 yaitu, Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meliputi: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan d) pelaporan. Selanjutnya yaitu pasal 6 yaitu, untuk mendukung

penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Menteri mengelola sistem informasi manajemen Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara terpadu.

Pada tahap perencanaan diatur dalam pasal 7 s/d pasal 10. Dimana pada pasal 7 memiliki dua ayat yaitu, 1) Perencanaan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilakukan melalui sepuluh program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. (2) Program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berpedoman pada: a) rencana induk Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan b) strategi Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Selanjutnya pasal 8 terdiri dari tiga ayat yaitu, 1) Rencana induk Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri. 2) Rencana induk berisi: a) visi dan misi, b) asas, c) tujuan dan sasaran, dan d) operasionalisasi sepuluh program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 3) Rencana induk disusun untuk jangka waktu lima tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Lebih lanjut pada pasal 9 yang tersiri dari empat ayat yaitu, 1) Strategi Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah sesuai dengan kewenangannya. 2) Strategi Gerakan PKK berisi: a) isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi; b) rumusan proses dan metode pelaksanaan Gerakan PKK; dan c. perencanaan program Gerakan PKK. 3) Dalam menyusun strategi Gerakan PKK, Menteri melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. 4) Strategi Gerakan PKK yang disusun oleh gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah disampaikan kepada Menteri secara berjenjang. Lebih lanjut lagi pada pasal 10 yaitu, ketentuan mengenai metode dan mekanisme penyusunan rencana induk dan strategi gerakan PKK diatur dalam Peraturan Menteri.

Pada bagian Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi diatur dalam pasal 15 dan juga pasal 16. Dimana pada pasal 15 yang terdiri dari tiga ayat menyatakan bahwa: 1) Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Gerakan PKK secara nasional. 2) Gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Gerakan PKK sesuai dengan kewenangannya. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pemantaran, dan evaluasi secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya yaitu pasal 16 yang memiliki tiga ayat yaitu, 1) Pelaporan pelaksanaan Gerakan PKK secara nasional disampaikan oleh Menteri kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) Pelaporan pelaksanaan Gerakan PKK sesuai kewenangannya disampaikan oleh gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/ lurah secara berjenjang kepada Menteri. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri.

2.3.2 Program Pokok Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilaksanakan melalui sepuluh program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 Pasal 11, meliputi:

- 1) Program penghayatan dan pengamalan Pancasila, berupa pembentukan dan penumbuhan karakter Keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Program gotong royong, berupa peningkatan kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar-Keluarga, warga, dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

- 3) Program pangan, berupa peningkatan ketahanan pangan Keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal.
- 4) Program sandang, berupa peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri sesuai moral budaya bangsa Indonesia.
- 5) Program perumahan dan tata laksana rumah tangga, berupa peningkatan kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah.
- 6) Program pendidikan dan keterampilan, berupa peningkatan kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 7) Program kesehatan, berupa penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 8) Program pengembangan kehidupan berkoperasi, berupa penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan taraf hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
- 9) Program kelestarian lingkungan hidup, berupa penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat.
- 10) Program perencanaan sehat, berupa penumbuhan dan peningkatan kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju Keluarga berkualitas.

2.4 Tinjauan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong menjelaskan bahwa pengertian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah sebagai berikut: Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian Bulan Bhakti Gotong Royong menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil pembangunan serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari departemen, lembaga pemerintah non departemen. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti; Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Sebutan Lain.

2.4.1 Pengorganisasian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pasal 5 s.d pasal 9. Pasal 5 terdapat dua ayat, yaitu 1) Pemerintah membentuk Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang anggotanya terdiri dari departemen, lembaga pemerintah non departemen, Dunia Usaha, LSM, dan unsur-unsur terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan 2) Pemerintah mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Lebih lanjut pada Pasal 6 terdapat dua ayat pula, yaitu 1) Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat provinsi yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi dan instansi terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan 2) Pemerintah Provinsi mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Pada tingkat Kabupaten/Kota pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) diatur pada Pasal 7 yang terdiri atas dua ayat, yaitu 1) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten dan Kota yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten dan kota serta instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan Gotong Royong Masyarakat; dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Lebih lanjut pada tingkat Kecamatan di Pasal 8 yang terdiri atas dua ayat telah diatur bahwa 1) Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat kecamatan; dan 2) Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Sementara pada tingkat Desa/Kelurahan diatur pada Pasal 9 yang terdiri atas dua ayat yaitu 1) Pemerintah Desa dan Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa dan kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan desa dan kelurahan, KPM, LSM, tokoh masyarakat desa/kelurahan; dan Tim

Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa/kelurahan melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat.

Selain terdapat pengorganisasian tim pelaksana, terdapat juga pembinaan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (1 dan 2). Pada ayat 1) dijelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing; sementara ayat 2) menjelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan sehari-hari.

Adapun monitoring, evaluasi dan pelaporan diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 12 dan 13. Pada Pasal 12 menyatakan bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Sementara pada Pasal 13 dijelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota, Camat, Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat secara berjenjang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilakukan dari tingkat paling atas sampai dengan tingkat paling bawah, seperti RT/RW. Sementara pengendalian pelaksanaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.

2.4.2 Bidang-Bidang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat meliputi 4 (empat) bidang yaitu bidang kemasyarakatan; ekonomi; sosial budaya dan agama; serta lingkungan. Bidang-bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat (1-4).

1. Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi : penguatan sistem keamanan lingkungan; pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan; peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa dan Kelurahan; penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional; penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat; penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak; penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya; kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
2. Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi: penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat; fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat; fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam; pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat; pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, Iantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya); kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
3. Kegiatan gotong royong dibidang sosial budaya dan agama meliputi: penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan

lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS); pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll); bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia; lomba kesehatan (seperti Lomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll); pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu); pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga; perlombaan dan pertandingan olahraga; Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dll); perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya; pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

4. Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi: pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya); pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih; pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman; penyuluhan tentang kesehatan lingkungan; konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

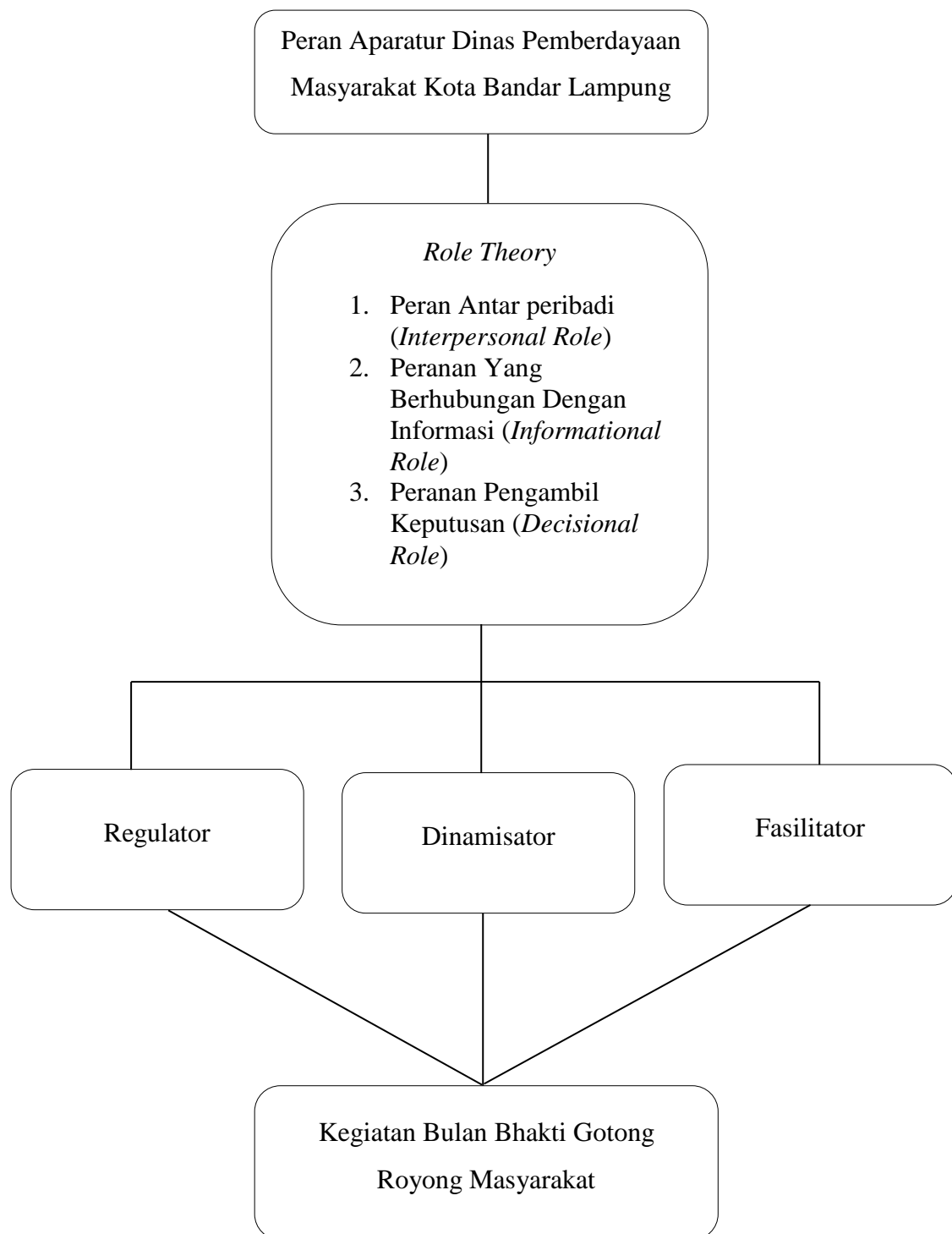
Berdasarkan peraturan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 merupakan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang meliputi empat bidang, yaitu bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu gambaran atau penjelasan terhadap objek permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung merupakan satu hal yang

sangat penting dalam kemajuan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Gotong Royong merupakan kegiatan sosial yang harus dilestarikan di kalangan masyarakat, lebih tepatnya pada tingkat perkotaan. Di tingkat perkotaan nilai gotong royong sudah mulai menurun akibat adanya budaya luar yang masuk ke Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini adalah kurangnya semangat dan kekompakan pengurus Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan sulitnya mengkoordinir warga masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong. Dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan dibutuhkan peran dari aparatur pemerintah untuk dapat menangani permasalahan tersebut.



Gambar 1. Kerangka Pikir
(Sumber : Peneliti, 2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan lebih bersifat deskriptif, karena pada permasalahan penelitian ini berhubungan dengan satu situasi sosial sampai masyarakat luas yang kompleks. Satu situasi sosial dapat terdiri dari satu orang, dengan aktivitas tertentu pada tempat tertentu (Sugiyono, 2020). Menurut Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2020) temuan dalam penelitian kualitatif bisa yang sederhana sampai kompleks, terjadi pada peristiwa tunggal atau majemuk, kecil atau besar. Bila dilihat dari *level of explanation*, penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

Menurut Sugiyono (2020) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Berdasarkan uraian tersebut maka instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal itu

dilakukan agar bisa lebih mendalam di dalam menemukan pemahaman makna, keunikan, konstruksi fenomena, dan hipotesis dari data yang diperoleh.

Dengan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti akan menemukan jawaban dari interaksi sosial yang terjadi antara peneliti dengan objek penelitian untuk mendapatkan jawaban dari Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan metode kualitatif lebih cocok untuk mengamati gejala sosial yang acap kali sulit untuk dipahami oleh setiap orang. Pada dasarnya metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna, makna disini adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu prinsip di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat menggali informasi secara langsung pada objek yang diteliti dan dapat meng-eksplorasi secara mendalam informasi yang ada pada instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena secara mendalam, diperlukan interaksi sosial antara peneliti dengan objek yang diteliti, sehingga fenomena masalah peran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dapat diuraikan dengan penelitian kualitatif dengan cara ikut berperan serta, melakukan wawancara dan menganalisis secara mendalam terhadap fenomena atau gejala yang terjadi pada objek yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dan di Kantor Kelurahan Kampung Baru

dengan objek penelitian adalah aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kelurahan Kampung Baru serta yang akan menjadi narasumber ialah orang yang dianggap berkompeten dan memahami akan permasalahan yang akan penulis angkat dan kemudian menjabarkan segala permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan kurang lebih 2 (dua) bulan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung belum melakukan perannya secara maksimal dan menyeluruh terhadap Kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dan di Kantor Kelurahan Kampung Baru dikarenakan ingin mengetahui apa saja peran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus dari penelitian ini adalah Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Di mana penelitian ini terdapat beberapa indikator yaitu: Regulator, Dinamisator, Fasilitator.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuain yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.

1. Pemerintah sebagai Regulator.

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan

dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator.

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu sebagai pembangkit partisipasi masyarakat melalui pembinaan kepada masyarakat terkait program kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang diberikan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator.

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu sebagai penyedia sarana dan prasarana tempat dengan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Pada penelitian kali ini, data yang dihimpun oleh penulis adalah tentang peran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Data tersebut akan berupa hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui wawancara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

3.5 Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang terpercaya dan benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian mengenai Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Informan dapat diperoleh dari kunjungan lapangan selama peneliti melakukan program magang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dimana di pilih secara *purposive* (dengan pertimbangan tertentu) yang merupakan metode penetapan informan berdasarkan informasi yang dibutuhkan.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan
1	Drs. Jainuddin, M.I.P.	Kepala Dinas PMK Bandar Lampung
2	Faisal Risa, S.Ag., S.H., M.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3	Rifya Rehmani, S.E., M.M.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
4	Tesis Patiwijaya, S.E.	Lurah Kampung Baru
5	Turminah	Sekretaris Kelurahan Kampung Baru

(Sumber : Peneliti, 2022)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik pengumpulan data yang kali ini dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Observasi

Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2020) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Pendapat Marshall dalam (Sugiyono, 2020) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Observasi dilakukan secara terus terang dan tersamar. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2020).

Dapat dipahami bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala-gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini yaitu terhadap Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di lapangan secara langsung, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Observasi di lakukan pada saat pada saat rapat mengenai kegiatan, penyusunan rencana strategi kegiatan dan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3. Kegiatan Observasi

No	Indikator	Kegiatan Observasi	Waktu Pelaksanaan Observasi
1	Regulator	Peneliti mengamati kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.	Observasi dilakukan selama peneliti melaksanakan program MBKM di dinas pemberdayaan masyarakat Kota Bandar Lampung.
2	Dinamisator	Peneliti mengamati saat melaksanakan pembinaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.	Observasi dilakukan selama peneliti melaksanakan program MBKM di dinas pemberdayaan masyarakat Kota Bandar Lampung.
3	Fasilitator	Peneliti mengamati saat melaksanakan pembinaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.	Observasi dilakukan selama peneliti melaksanakan program MBKM di dinas pemberdayaan masyarakat Kota Bandar Lampung.

(Sumber : Peneliti, 2023)

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2020). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, tujuannya adalah agar dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga bisa menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Wawancara dilakukan dengan memilih informan yang sudah ditentukan dengan pertimbangan bahwa informan adalah orang yang paham berkaitan dengan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandar Lampung.

Dari pengertian diatas, peneliti memahami bahwa wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan menggunakan alat panduan wawancara.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga dapat digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan. Proses wawancara dilakukan berdasarkan dengan teori yang dipakai. Dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan untuk memperoleh beberapa data, yaitu :

1. Regulator, data yang diambil yaitu mengenai kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan pemerintah yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
2. Dinamisator, data yang diambil yaitu mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
3. Fasilitator, data yang diambil yaitu mengenai sarana dan prasarana pelaksanaan program kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, Lurah Kampung Baru dan Sekretaris Kelurahan Kampung Baru.

Peneliti telah melakukan turun lapangan beberapa kali untuk melakukan wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dan Kelurahan Kampung Baru. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan wawancara mendalam dan direkam dengan bantuan HandPhone dan dicatat dalam buku catatan pribadi. Berikut deskripsi proses wawancara yang peneliti lakukan beserta dengan Informan yang diwawancarai:

Tabel 4. Kegiatan Wawancara

No	Nama Responden	Jabatan	Tanggal	Jam	Lokasi
1	Faisal Risa S.Ag., S.H., M.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3/Februari/2023	10.05 WIB	Dinas PMK
2	Rifya Hermani S.E., M.M.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	3/Februari/2023	12.08 WIB	Dinas PMK
3	Jainuddin S.Ip., M.Ip.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat	15/Februari/2023	11.27 WIB	Dinas PMK
4	Turminah	Sekretaris Kelurahan Kampung Baru	6/Maret/2023	09.37 WIB	Kantor Kelurahan Kampung Baru
5	Tesis Patiwijaya S.E.	Lurah Kampung Baru	6/Maret/2023	10.22 WIB	Kantor Kelurahan Kampung Baru

(Sumber : Peneliti, 2023)

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020). Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2020) hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung dan ditujukan pada subjek penelitian, melalui dokumen. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sumber data yang mendukung dari sumber data sebelumnya yaitu wawancara dan observasi. Adapun bentuk dokumentasi yang peneliti dapatkan terkait dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu berupa :

1. Proses wawancara dengan responden
2. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung
3. Rencana strategi kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2022
4. Laporan pelaksanaan sub-kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Pengolahan Data

1. Editing Data

Editing data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara yang dilakukan kepada aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, Aparatur Kelurahan Kampung Baru, serta terdapat beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini kemudian peneliti melakukan kegiatan editing data yang bermaksud untuk memperjelas data. Data yang peneliti olah menggunakan editing data yaitu berdasarkan pada hasil wawancara, observasi serta dokumentasi agar lebih mudah dipahami oleh peneliti, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain, dan khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus

penelitian yaitu tentang peran aparaturnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, kemudian peneliti merangkum data tersebut hingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, tepat dan jelas.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah serangkaian proses meninjau data melalui beberapa proses yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan membantu memberikan beberapa makna pada data dan menghasilkan kesimpulan yang relevan untuk hasil dari penelitian. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian di jabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif ini ada tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan meringkas, memilah, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. Setelah data direduksi, data yang ditampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah data yang dikumpulkan.

Jadi reduksi data ini dapat diartikan sebagai bentuk dari analisis untuk memilih, memfokuskan, mempertajam, membuang, dan menyusun data dalam sebuah cara dengan kesimpulan akhir, digambarkan, dan diversifikasikan. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data dari hasil observasi, wawancara mendalam yang diperoleh dan menyesuaikan

dengan fokus penelitian sehingga apa yang benar-benar diperlukan dalam penelitian sudah terpenuhi.

Reduksi data dilakukan oleh peneliti karena peneliti harus menganalisis data, dalam mereduksi data peneliti merangkum data-data pokok yang telah didapatkan, kemudian peneliti memisahkan data-data pokok yang didapatkan dari setiap indikator serta membuang sebagian data yang sekiranya tidak memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti teliti. Sehingga hal tersebut dapat lebih mempermudah peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Hasil dari kesimpulan ini ditampilkan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini hal yang disimpulkan terkait fokus penelitian yaitu Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator.

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan pada saat penelitian telah selesai dilaksanakan, mulai dari dilaksanakannya observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dan juga diperkuat dengan adanya dokumentasi sebagai bukti atas adanya penelitian.

Setelah hasil data yang didapatkan di lapangan di reduksi diambil hal-hal pokoknya (reduksi data) dan di display (*display data*) kemudian akan di

dapatkan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

3.9 Teknik Validasi Data

Salah satu cara yang digunakan oleh penulis dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan menggunakan triangulasi. Teknik yang digunakan dalam triangulasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012), adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dikerjakan melalui pengecekan data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data dari lapangan melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, kemudian membandingkan hasil penelitian melalui wawancara dengan dokumen yang ada.

Dalam triangulasi sumber, peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yaitu hasil observasi, hasil wawancara yang mendalam dan dokumentasi yang telah didapatkan oleh peneliti, selanjutnya data tersebut dibandingkan dengan berdasarkan pada observasi yang menghasilkan realita yang terjadi di lapangan dengan hasil pernyataan yang disampaikan oleh narasumber melalui wawancara yang mendalam. Sehingga peneliti dapat melihat perbedaan antara hasil observasi dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang telah diperoleh penulis di cek melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila terdapat hasil data yang berbeda, maka penulis akan melakukan diskusi kepada informan yang dimaksud dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dari sebuah data.

Dalam triangulasi teknik, peneliti melakukan pengecekan terhadap teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi dengan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh data mengenai peran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat

4.1.1. Riwayat Nama-Nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Adapun riwayat nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yakni, sebagai berikut :

Tabel 5. Riwayat Nama – Nama Kepala Dinas PMK

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	MASA KEPEMIMPINAN
1	<u>Drs. Ramlan Amron</u> NIP. 19591028 197909 1 001	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	Februari 2008 s.d Januari 2011
2	<u>Ir. Nizom Ansori</u> NIP. 19600216 199003 1 004	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung	Februari 2011 s.d Maret 2011
3	<u>Drs. Zainul Bahri</u> NIP. 19571205 198603 1 003	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung	April 2011 s.d Oktober 2015
4	<u>Drs. Gumsoni AS, M.Si.</u> NIP. 19660812 198602 1 004	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan	November 2015 s.d Desember 2016

		Pemerintahan	
		Kelurahan Kota	
		Bandar Lampung	
5	<u>Yus Amri Agus, S.Sos., M.I.P.</u> NIP. 19580606 198212 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	Januari 2017 s.d Juni 2018
6	<u>Ahmad Taufik, S.E.</u> NIP. 19590812 198703 1 008	Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	Juli 2018 s.d Oktober 2018
7	<u>Drs. Jainuddin, M.I.P.</u> NIP. 19630804 199003 1 005	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	November 2018 s.d Sekarang.

(Sumber : Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2023)

4.1.2. Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Adapun jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yakni, sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Pegawai Dinas PMK Bandar Lampung

NO	STATUS	JUMLAH
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	22 Orang
2	Pegawai Tenaga Kontrak (PTK)	7 Orang
Total		29 Orang

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2023)

4.1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, Dinas PMK merupakan unsur pelaksana otonom daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu, untuk tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2021 ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4. Tujuan Dan Sasaran Tugas Fungsi Pokok

a. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan dan daya saing ekonomi masyarakat.
- Meningkatnya keberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

b. Sasaran

- Meningkatnya usaha produktif ekonomi masyarakat.
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dan meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

4.1.5. Susunan Organisasi, Nama Dan Struktur Jabatan Pegawai Dinas PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kota Bandar Lampung

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kota Bandar Lampung. Susunan Organisasi Dinas PEMBERDAYAAN MASYARAKAT terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang PEMBERDAYAAN Kelurahan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
4. Bidang PEMBERDAYAAN Masyarakat : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
5. Bidang Pengembangan Potensi Ekonomi Kelurahan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
6. Unit Pelaksana Teknis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya adapun nama dan struktur jabatan pegawai Dinas PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Tabel 7. Nama dan Struktur Jabatan Pegawai PMK

NO	NAMA/NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Drs. Jainuddin, M.I.P NIP. 19630804 199003 1 005	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Dinas
2	Widya Nuri Wati, S.STP., M.M. NIP. 19820525 200012 2 001	Pembina	IV/a	Sekretaris
3	Herry Lesmana, S.E. NIP. 19751209 200212 1 003	Penata Tingkat I	III/d	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tabel 7 Lanjutan

NO	NAMA/NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
4	Yudi Ismunandar, S.Sos., M.M. NIP. 19760308 200902 1 007	Penata Muda Tingkat I	III/b	Staf
5	Yusanti, S.A.B. NIP. 19800310 201407 2 001	Penata Muda	III/a	Staf
6	Rindu Persada, S.Kom., M.Sos.		PTK	Staf
7	Rahul Akbar Saripudin		PTK	Staf
8	Aisyah Dwi Febriani		PTK	Staf
9	Eis Nuranisa		PTK	Staf
10	Muhammad Mayudi Charismaputra, S.E. NIP. 19840808 201001 1 014	Penata Tingkat I	III/d	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset
11	Rohila, S.I.P., M.M. NIP. 19660612 200604 2 002	Penata	III/c	Staf
12	Popi Diana, S.I.P., M.M. NIP. 19770222 199803 2 002	Penata	III/c	Staf
13	Ahmad Sahroni NIP. 19851208 201001 1 003	Pengatur	II/c	Staf
14	Valdo R. Warganegara, S.E., M.M.		PTK	Staf
15	Abdurahman, S.E., M.M. NIP. 19691228 199103 1 006	Pembina Tingkat I	IV/b	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelurahan
16	Rika Andika, S.H., M.M. NIP. 19810122 200604 2 005	Pembina	IV/a	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
17	A. Rino Akuan, S.H. NIP. 19750416 200312 1 004	Pembina	IV/a	Staf

Tabel 7 Lanjutan

NO	NAMA/NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
18	Yuli Susilawati Us, S.H., M.H. NIP. 19790709 200902 2 002	Penata Tingkat I	III/d	Staf
19	Nining Safitri		PTK	Staf
20	Faisal Risa, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19720702 199503 1 001	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
21	Rifya Rehmani, S.E., M.M. NIP. 19860529 201001 1 006	Penata Tingkat I	III/d	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
22	Muhamad Chandra Purnama Nurdin, S.E. NIP. 19740703 200312 1 005	Penata	III/c	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
23	Diana Nety, S.I.P. NIP. 19750305 200701 2 007	Penata	III/c	Staf
24	Fadhil Alman Falutie, S.STP., M.M. NIP. 19940101 201609 1 004	Penata Muda Tingkat I	III/b	Staf
25	Beny Saputra, S.Kom.		PTK	Staf
26	Etty Yuliarna, S.Sos., M.M. NIP. 19690701 199703 2 001	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Ekonomi Kelurahan
27	Zainal Abidin, S.H., M.H. NIP. 19660523 198703 1 004	Pembina	IV/a	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
28	Nurjannah, S.Sos., M.M. NIP. 19660405 199210 2 002	Pembina	IV/a	Staf

29 Boni M Supriatna, S.E., M.M. Penata Tingkat I III/d Staf
NIP. 19810402 201001 1 006

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2023)

4.1.6. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung di tugaskan pada misi ke 4. Adapun misi tersebut yakni, “Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Selain itu dalam kapasitasnya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan, khususnya dalam meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam membangun penguatan struktur ekonomi daerah dan penanggulangan kemiskinan.

Pada lingkup tersebut, maka sebagai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung memformulasikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan			
Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.		
Misi	Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian.	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.	Mendorong peningkatan partisipasi dari semua elemen masyarakat.	Melakukan identifikasi sumber daya masyarakat untuk dibina melalui pembekalan, sosialisasi, edukasi dan pendampingan aksi.
--	---	---	--

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2021)

4.2 Gambaran Umum Kelurahan Kampung Baru

Pada sekitar Tahun 80-an Kampung Baru masih bernama *Kruch* dan pada saat itu belum terjadi pemekaran wilayah. Pada Tahun 90-an Pemerintah Kota Bandar Lampung mengubah nama *Kruch* menjadi Kampung Baru, hal ini terjadi karena pada kondisi saat itu banyak nya penduduk yang berdatangan untuk menetap di wilayah Kampung Baru. Setelah terjadi pemekaran wilayah maka Kampung Baru terbagi menjadi dua Kelurahan yaitu Kampung Baru dan Kampung Baru Raya.

4.2.1 Letak Geografis

Kelurahan Kampung Baru secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Labuhan Ratu, dengan memilik luas wilayah \pm 85 Ha. Selain itu Kelurahan Kampung Baru memiliki 10 RT dan memiliki 2 lingkungan, dengan setiap 1 lingkungan membawahi 5 RT. Adapun batas wilayah Kelurahan Kampung Baru sebagai berikut :

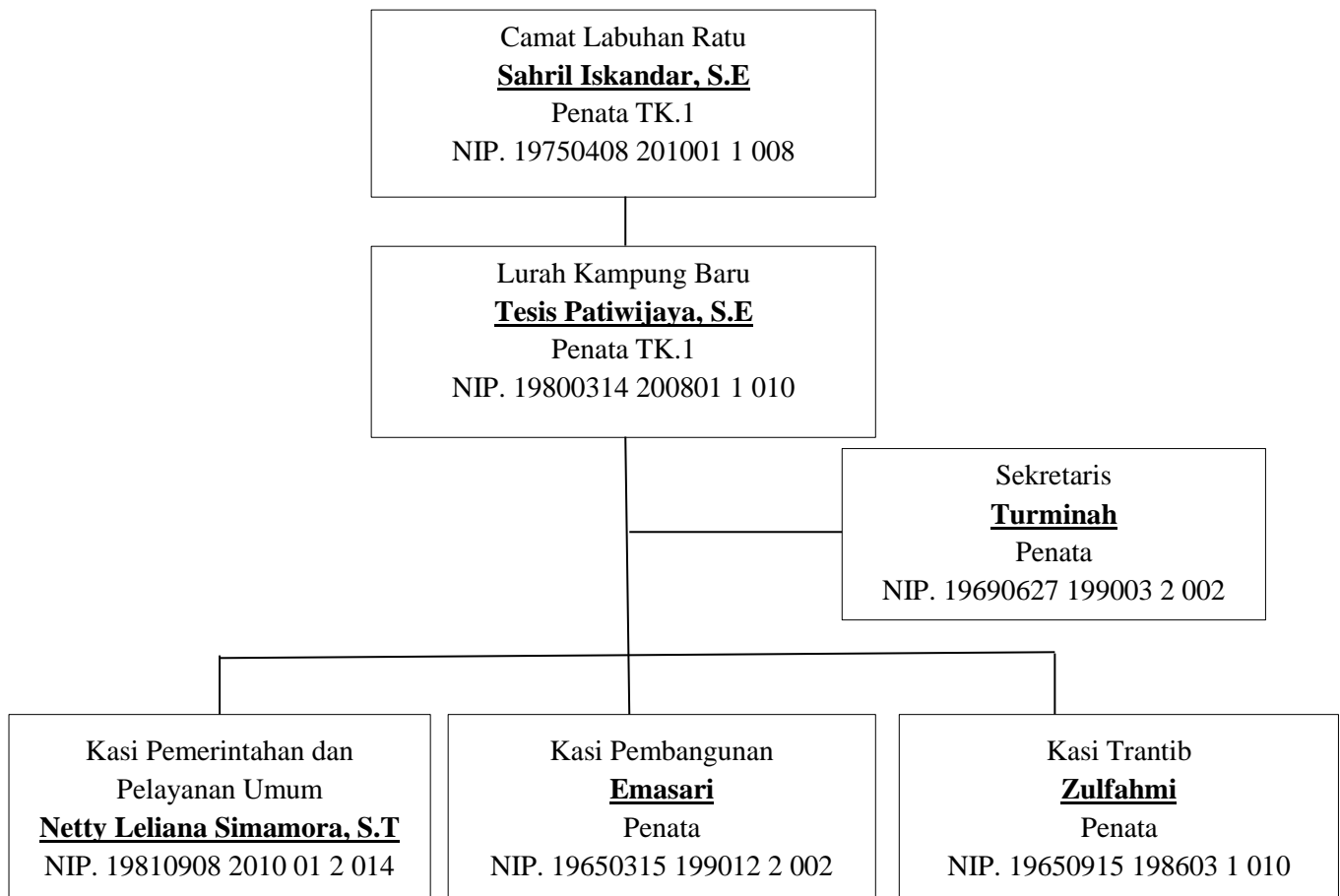
Tabel 9. Batas Wilayah Kelurahan Kampung Baru

Batas	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Gedong Meneng	Raja Basa
Sebelah Selatan	Kampung Baru Raya	Labuhan Ratu
Sebelah Timur	Raja Basa	Raja Basa
Sebelum Barat	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu

(Sumber : Peneliti, 2023)

4.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang penting yang harus dalam penyelenggaraan pemerintahan, berikut peneliti tampilkan visualisasi bagan struktur organisasi Kelurahan Kampung Baru sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Kampung Baru
(Sumber : Kelurahan Kampung Baru, 2023)

4.3 Gambaran Umum Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Dalam rangka penanaman nilai-nilai sosial budaya terutama dalam aspek kegotong-royongan adalah ciri khas budaya Indonesia yang secara turun-terurun sudah mengakar, terpelihara dan melembaga dimasyarakat dan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Praktek kegotong-royongan dan keswadayaan masyarakat dapat dilihat dari berbagai momen antara lain kegiatan yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan dan kegiatan pelaksanaan pembangunan kelurahan .

Dalam rangka memperkuat integrasi sosial, integrasi bangsa dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat kita, sebagai bagian dari nilai budaya bangsa melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan memotivasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal, serta menggelorakan kembali semangat kegotong-royongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung, perlu dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

4.3.1 Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

4.3.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat

integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan

Untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Kegiatan tersebut mengikutsertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur departemen, lembaga pemerintah non departemen.

4.3.3 Sub-kegiatan yang Dilaksanakan

Sub-Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Efikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

4.3.4 Indikator dan Keluaran

1. Indikator

Indikator dari Sub-kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah Pelaporan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kota Bandar Lampung sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang.

2. Keluaran

Keluaran dari Sub-kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kota Bandar Lampung sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

4.3.5 Cara pelaksanaan Sub-kegiatan

a. Metode pelaksanaan Sub-Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan :

1. Membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota serta instansi/lembaga Pemerintah dan lembaga non pemerintah.
2. Tim Fasilitasi tersebut kemudian mengadakan Penilaian Instrumen Verifikasi Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Kelurahan yang kriterianya didasarkan dari Instrumenerifikasi Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong.

b. Tahapan Sub-Kegiatan

1. Tahap pembentukan Tim Fasilitasi dan persiapan pelaksanaan
2. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis
3. Pengumpulan dan Pengolahan data dengan instrumentenilaian.
4. Evaluasi, Penilaian instrumenterifikasi dan Pelaporan.

4.3.6 Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Sub-Kegiatan akan dilakukan pada wilayah Kecamatan di Kota Bandar Lampung.

4.3.7 Jadwal Pelaksanaan Sub-kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat akan dilakukan mulai bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 10. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembentukan Tim dan Persiapan												
2	Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis												
3	Pengumpulan Data dan Pengolahan Data												
4	Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan												

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2022)

4.4 Laporan Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Dalam rangka Penanaman nilai-nilai sosial budaya terutama dalam aspek kegotong-royongan adalah ciri khas budaya Indonesia yang secara turun temurun telah mengakar, terpelihara dan melembaga dimasyarakat dan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Praktek kegotong-royongan dan keswadayaan masyarakat dapat dilihat pada berbagai momen antara lain kegiatan yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan, adat istiadat, kekerabatan, keagamaan dan kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan.

Dalam rangka memperkuat integrasi sosial, integrasi bangsa dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong-royong yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat kita sebagai bagian dari nilai budaya bangsa melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan

memotivasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal, serta menggelorakan kembali semangat kegotong-royongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung, perlu dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

4.4.1 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdaya gunadan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Tujuan

Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur departemen, lembaga pemerintah non departemen.

4.4.2 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Pelaksanaan Sub-Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah terlaksananya Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Bandar Lampung.

4.4.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Pembinaan

- a. Lokasi Pembinaan : Hotel Horison Lampung, Jl. Kartini No. 88, Kota Bandar Lampung

- b. Waktu Pembinaan : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
 c. Tanggal Pembinaan : 10 November 2022

4.4.4 Pemateri/Narasumber dan Ringkasan Materi

Tabel 11. Ringkasan Materi Narasumber

1	Nama	Mayor INF. H.G. Sinaga
	Organisasi Asal Pemateri	Kodim Kota Bandar Lampung
	Ringkasan Materi	<p data-bbox="740 692 1230 725">TMMD (TNI Manuggal Masuk Desa)</p> <p data-bbox="740 748 1356 1003">a. TMMD untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik dan bermanfaat bagi kepentingan pertahanan negara di darat.</p> <p data-bbox="740 1077 1356 1167">b. Tahapan TMMD meliputi: Perencanaan, Perispan, Pelaksanaan, Pengakhiran.</p> <p data-bbox="740 1189 1356 1496">c. Perencanaan: Merencanakan kegiatan fisik dan non fisik setelah memukan daerah sasaran yang akan dijadikan objek kegiatan TMMD yang akan datang, selanjutnya merinci objek kegiatan/saran TMMD baik yang bersifat fisik maupun non fisik.</p> <p data-bbox="740 1518 1356 1937">d. Persiapan: dan satgas menghadiri Rakornis TMMD yang diselenggarakan oleh PJOPKO dan PKP; Melaksanakan rapat koordinasi teknis di tingkat Kota/Kabupaten; menyiapkan administrasi TMMD; Menyiapkan acara paparan; Sebelum kegiatan upacara pembukaan TMMD direncanakan kegiatan paparan oleh</p>

dan satgas kepada Bupati dan pejabat yang hadir; Menyiapkan personel yang terlibat dalam Satgas. Dandim menyusun personel yang terlibat dalam nominatif Satgas sesuai kemampuan satuan, instansi dan bidang tugas dengan kegiatan.

e. Pelaksanaan :

- Objek sasaran dikerjakan oleh TNI dibantu masyarakat dan harus bahu membahu sehingga tidak menampilkan sikap mandor yang hanya bisa memerintah tapi tidak dapat mengerjakan;
- Perhatikan pembagian kelompok tenaga ahli dalam melaksanakan sasaran fisik, ada sasaran fisik yang betul-betul perlu tenaga ahli dan ada yang tidak perlu.
- Untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan, perlu mempersiapkan tempat dan sarana yang dibutuhkan sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran yang diharapkan.
- Dan SSK harus mempertimbangkan kondisi cuaca dilokasi dihadapkan dengan jumlah sasaran yang harus diselesaikan dan waktu serta dukungan materiil bila datangnya terlambat, bila perlu objek sasaran dikerjakan pada malam hari.

f. Pengakhiran

- Embarkasi/pergeseran pasukan kembali ke home base.
-

	<ul style="list-style-type: none">• Tahap Purna Manunggal. Dalam tahap purna manunggal ada 3 kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan yaitu pembuatan laporan, evaluasi kegiatan dan pemeliharaan hasil TMMD.
2 Nama	Ir. H. Amir Machmud Hasan
Organisasi Asal Pemateri	Dinas PMD Provinsi Lampung
Ringkasan Materi	<p>Implementasi Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Kota:</p> <p>Problematika Gotong Royong di Zaman Now</p> <p>Menurut istilah gotong royong berarti kerja</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menurut istilah gotong royong berarti kerja bersama-sama.b. Gotong Royong bermanfaat dalam menciptakan rasa kebersamaan, menumbuhkan sikap saling membantu, membina hubungan sosial, mempererat tali persaudaraan, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas kerja.c. Masyarakat harus memahami nilai-nilai dalam gotong royong.d. Masyarakat memiliki Kearifan Lokal yang harus dipertimbangkan.e. Gotong royong pada masa kini tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang diwariskan tetapi harus dibentuk dan dibiasakan.f. Penyebab Menurunnya Semangat Gotong Royong: Kesibukan, Pemahaman Keliru mengenai Bantuan, Kecemburuan Sosial Kurangnya Bersosialisasi, Malas.g. Tidak bisa dipungkiri bahwa Masyarakat

Kota bersikap *PROJECT ORIENTED*.

- h. Tawaran Solusi Transparansi berbanding lurus dengan Partisipasi dan Libatkan masyarakat untuk menggali permasalahan bersama (FGD), jangan hanya terbatas pada aktivitas fisik, perhatikan juga aspek sosial ekonominya. Musyawarah RT adalah mutlak dilakukan, hidupkan lagi peran Dasawisma tingkat RT, kreativitas pemerintah lokal (RT) dalam mengimplementasikan makna gotong royong.
- i. Melalui BBGRM kita pupuk dan lestarikan kembali semangat kegotong-royongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2022)

4.4.5 Diskusi

Diskusi yang terjadi pada saat acara pembinaan antara lain:

a. Pertanyaan

1. Bagaimana agar suatu daerah dapat merasakan dari program TMMD?
2. Apakah kegiatan TMMD hanya bersifat Fisik?
3. Apakah penyebab runtuhnya nilai nilai gotong royong?

b. Tanggapan

1. Perangkat desa/kelurahan membuat usulan yang di akomodasi dalam musrenbang. Setelah usulan di terima akan di verifikasi oleh tim TMMD. Apabila usulan telah disetujui maka akan di laksanakan bersama sama baik pemerintah, TNI dan warga masyarakat.
2. Kegiatan TMMD tidak hanya bersifat fisik tetpi juga non fisik.

3. Nilai gotong royong kurang terasa pada masyarakat perkotaan karena sifat masyarakatnya yang cenderung individual. Persaingan hidup di kota yang berat membuat masyarakat cenderung kurang bersosialisasi. Kita berharap nilai gotong royong mulai di bangun melalui peran aparat pemerintah utamanya Camat dan Lurah, bagaimana mampu memberdayakan para RT dalam menumbuhkan nilai gotong royong di masyarakat perkotaan

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan terkait Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin di bawah ini.

1. Peran pemerintah sebagai regulator, dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat mayoritas masyarakat belum mengetahui peraturan seperti apa yang digunakan dan diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Sehingga masyarakat hanya mengikuti sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.
2. Peran pemerintah sebagai dinamisator, pelaksanaan pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kurang membantu untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kegiatan tersebut karena masyarakat perkotaan memiliki kesibukan yang membuat masyarakat Kampung Baru tidak dapat berperan aktif dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Dan pada saat dilaksanakannya pembinaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat belum melibatkan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, hanya satu kelurahan sebagai perwakilan dari setiap kecamatan untuk menghadiri pembinaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator, pada saat pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Hotel Horison pada tanggal 10 November 2022, situasi kurang kondusif karena ada beberapa kelurahan

yang terlambat datang, adapun juga kelurahan yang baru datang pada saat pembinaan sudah berlangsung. Dan pada saat sedang berlangsungnya pembinaan ada beberapa perwakilan kelurahan atau kecamatan yang keluar dari area pembinaan dan tidak masuk kembali.

6.2 Saran

Adapun beberapa masukan atau saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Regulator, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebaiknya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan yang digunakan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui mengenai peraturan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
2. Dinamisor, sebaiknya pembinaan tetap diberikan kepada semua kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung meskipun kelurahan tersebut tidak mengikuti lomba. Sehingga, masyarakat akan lebih terpacu untuk meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan gotong royong.
3. Fasilitator, sebaiknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung memberikan teguran ringan kepada setiap kecamatan yang datang terlambat dan tidak ikut masuk dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, agar kondisi pada saat pembinaan lancar dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bahasa, Pusat. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chatarina Rusmiyati. (2011). *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Conyers, Diana.1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Bandung: Yarsif Watampone.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas sosial dan partisipasi Masyarakat desa Transisi, suatu tinjauan sosiologis*. Surabaya: UMM Press.
- Poerwodarminta 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Sarwono, S. W. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian. 1992. *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Gafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suparjan & Hempri S. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Totok dan Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wrihatnolo, Randy R, Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Zubaedi. 2013. *“Buku Pengembangan Masyarakat Wawancara dan Praktik”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Skripsi :

- Hidayah, Eva Nur. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Cahyono, Dwi. 2008. *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran, dan Konflik Peran Sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Khali, Dhiaul. 2017. *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil*. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Jurnal :

- Anggraini, Fitri Febrina, Djumiarti, Titik. *Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang*. Departemen Administrasi Publik Fisip Undip, 1-14.
- Ardana, Thania. Angin, Ria. 2020. *Analisis Implementasi Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember)*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Almasri, Drs M. Si. Deswimar, Devi S. Sos, M. Si. 2004. *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan*. Jurnal.
- Cahyono, Sunit Agus Tri. 2008. *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta : B2P3KS.
- Hia, Era Era. 2019. *The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah. XI(2). 35-51.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. 2018. *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*. 11(1). 72-88.
- Rahmawati, Nida. 2016. *Analisis Peran Supervisi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas (Studi Kasus di Puskesmas Poncol Kota Semarang)*. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik). 4(2). 32-46.
- Steffany Makatumpias, T.A.M. Ronny Gosal, Pangemanan, Sofia E. 2017. *Peran Kepala Puskesmas dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe)*. Jurnal Eksekutif. 1(1). 1-14.
- Suwardianto, Sigit. 2015. *Peranan Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*. Jurnal Ilmu administrasi publik. 5(7). 1-171.
- Sugiri, Lasiman. 2015. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro.
- Setiawan, Edi. Iswanto, Edhi. 2019. *Implementasi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Gerakan Gotong Royong (Studi kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)*. Jurnal Politico.

Yusuf, Iyas. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Di akses pada Desember 2022. <http://www.iyasyusuf.work/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintah-dalam-html>

Dokumen :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. 2021. “Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. (Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat)”. Laporan Akhir.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2021. “Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026”.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2021. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.